



Rancangan Awal RKP 2020 dan Pendanaannya

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan pada:

RAKORBANGPUS
Jakarta, 30 April 2019



AGENDA





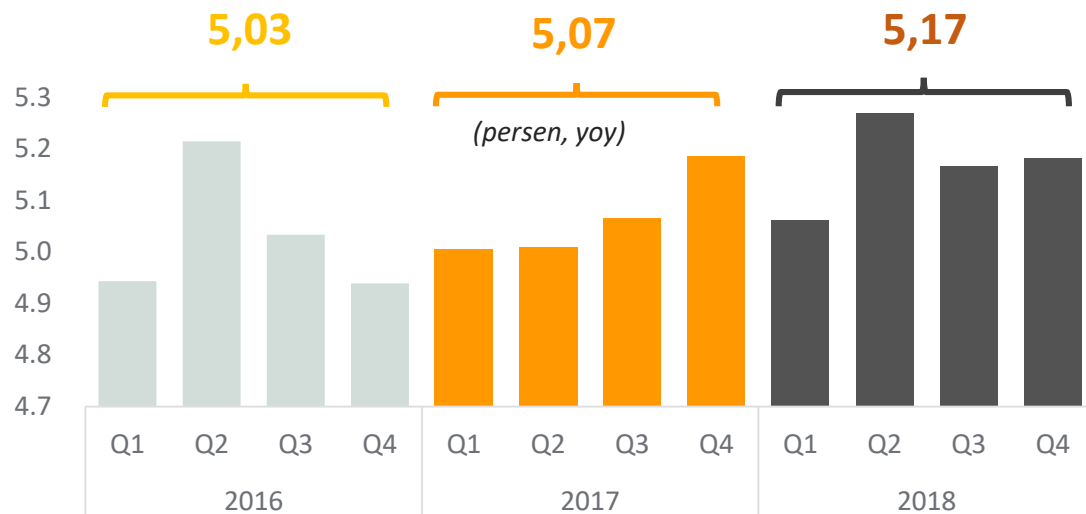
Pencapaian Pembangunan Nasional





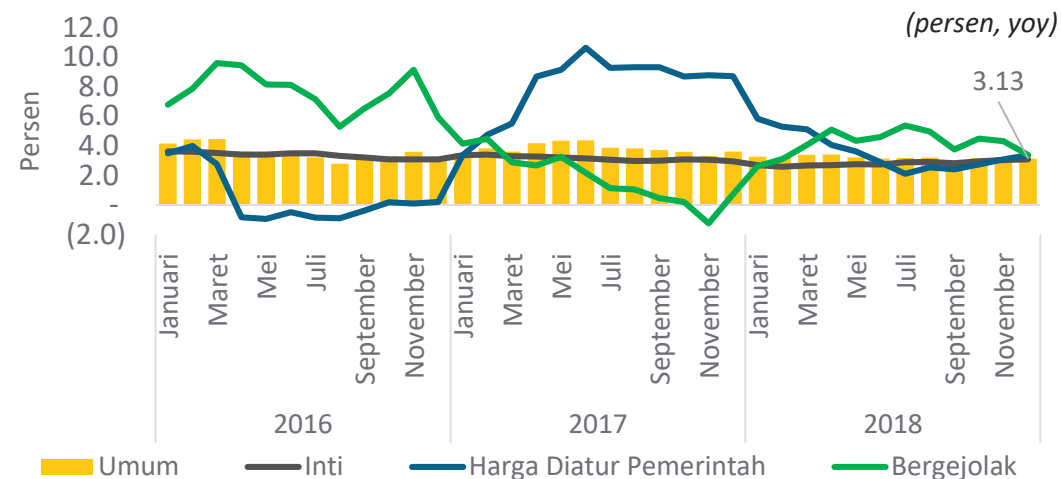
Pertumbuhan Ekonomi terus Menguat dengan Stabilitas Ekonomi Terjaga

Pertumbuhan ekonomi meningkat didorong oleh penguatan investasi dan konsumsi RT



Komponen Pengeluaran	2017	2018				2018
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
Konsumsi Rumah Tangga	4,94	4,94	5,16	5,00	5,08	5,05
Konsumsi LNPR	6,93	8,10	8,75	8,59	10,79	9,08
Konsumsi Pemerintah	2,13	2,71	5,20	6,27	4,56	4,80
PMTB/Investasi	6,15	7,94	5,85	6,96	6,01	6,67
Ekspor	8,91	5,94	7,65	8,08	4,33	6,48
Impor	8,06	12,64	15,17	14,02	7,10	12,04
PDB	5,07	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17

Inflasi stabil pada tingkat yang rendah



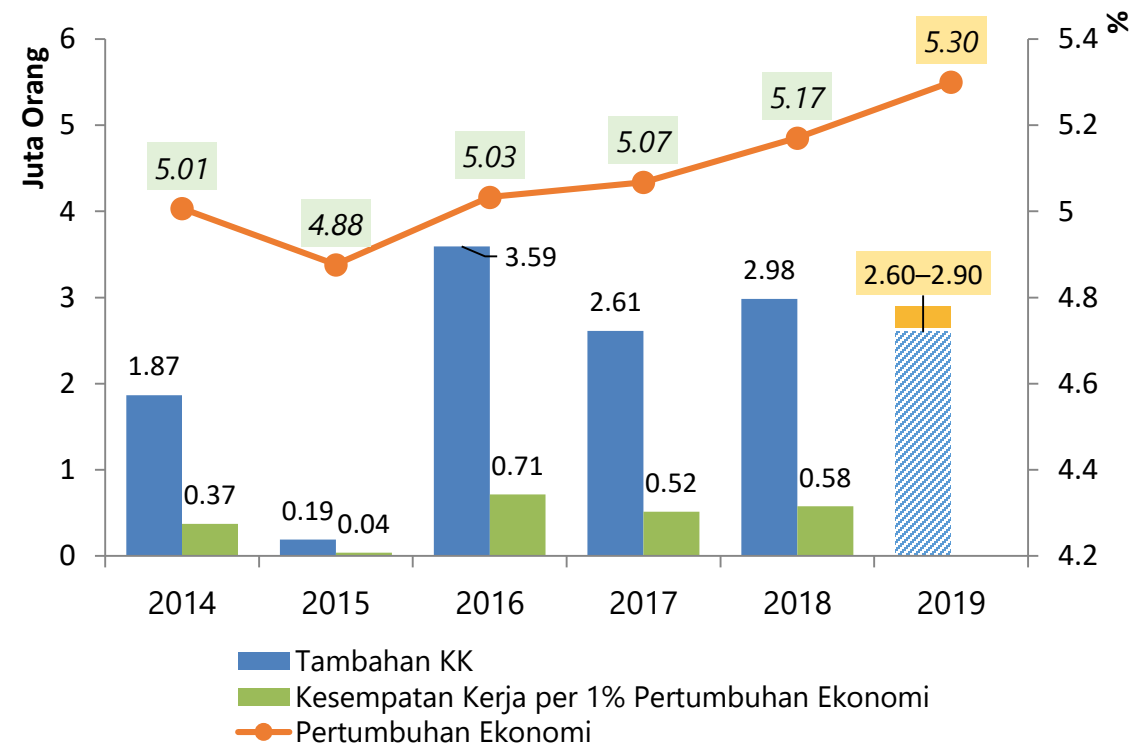
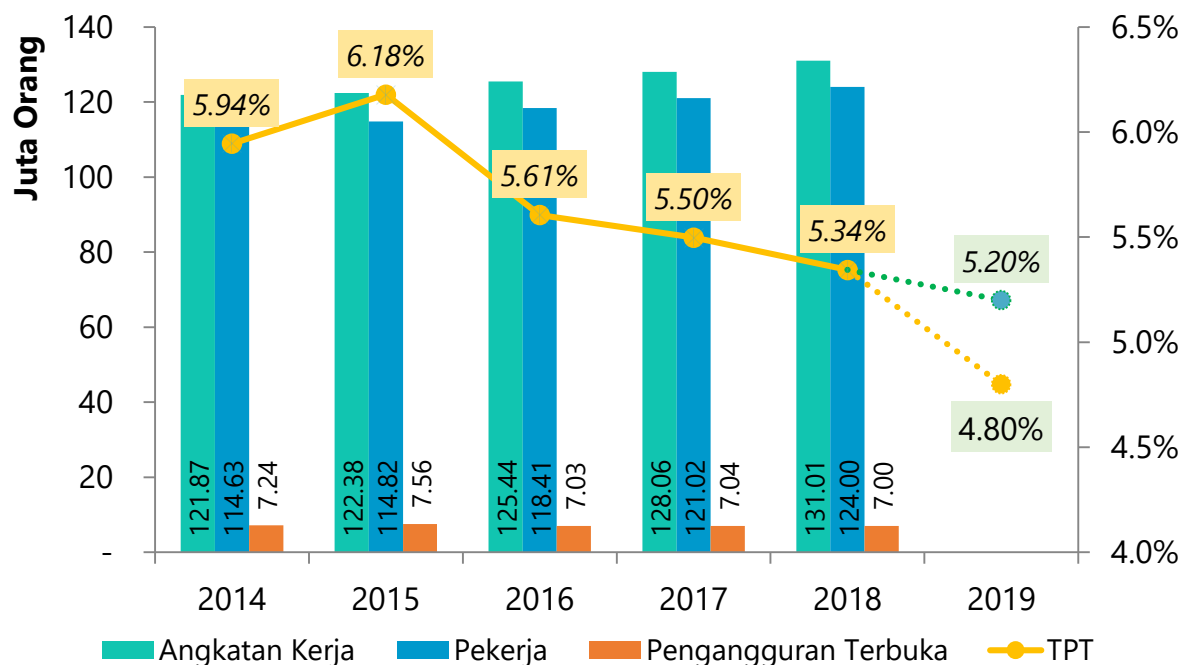
Rupiah menguat terhadap dolar AS





Tingkat Pengangguran Berhasil Diturunkan Seiring Meningkatnya Penciptaan Kesempatan Kerja

- Pada 2018 lapangan kerja meningkat 2,98 juta. Jumlah pengangguran turun 39 ribu orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,34%.
- Penciptaan kesempatan kerja tinggi dan dapat melampaui target RKP dan RPJMN 2015-2019 yang sebesar 10 juta orang. Jumlah penciptaan lapangan kerja 2015-2018 telah mencapai 9,38 juta.
- Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2019, diperkirakan akan tercipta 2,6–2,9 juta lapangan kerja, sehingga TPT diperkirakan akan masuk dalam rentang 4,8–5,2%.

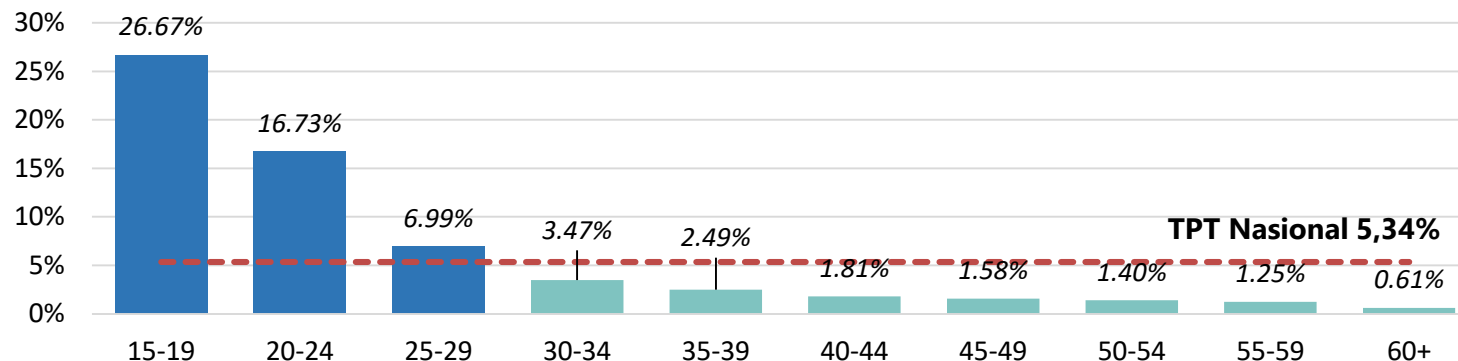




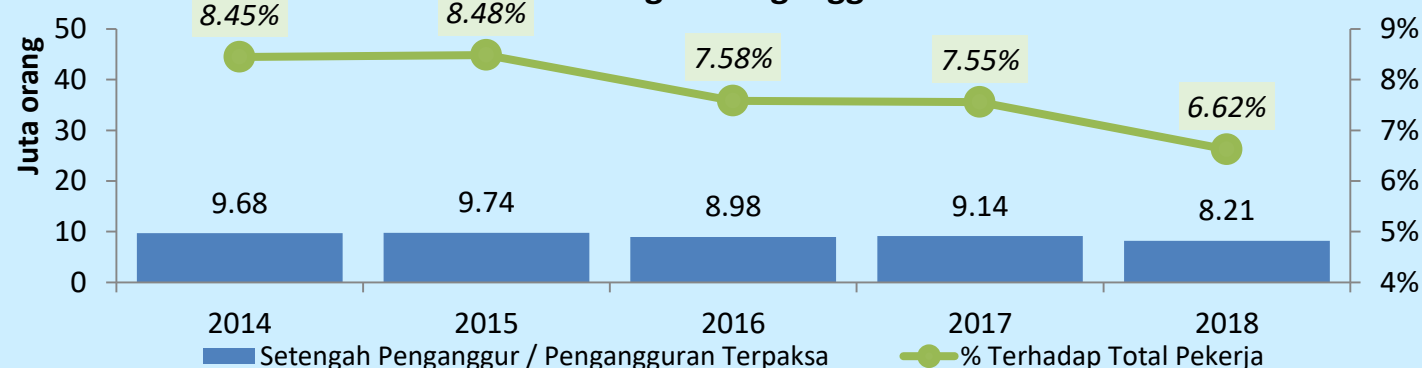
Tetapi TPT kaum muda dan lulusan SMK yang tinggi, serta keberadaan setengah penganggur masih perlu menjadi perhatian

- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia muda berada di atas TPT nasional. TPT 15-19 tahun mencapai 26,67% dan 20-24 tahun 16,73%.
- TPT lulusan SMK sebesar 11,24%. Besarnya TPT tersebut disusul oleh lulusan SMA 7,95%.
- Proporsi setengah penganggur 2018: 6,62% (8,21 juta orang), berhasil turun dari 8,45% di 2014. 39,02% setengah penganggur berusia 15-29 tahun (3,2 juta orang).

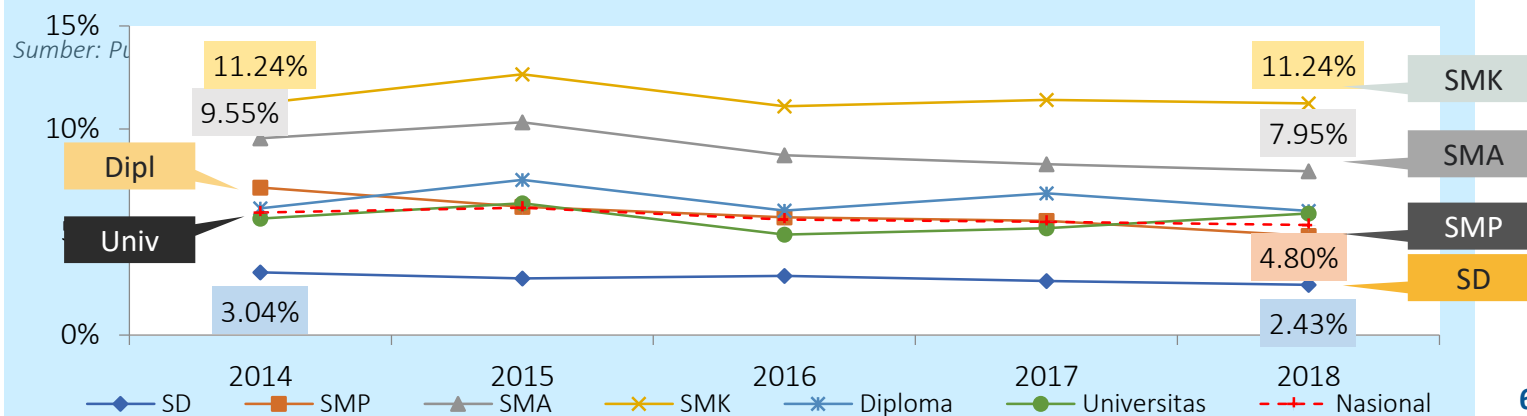
TPT Berdasarkan Kelompok Umur dan Nasional, 2018



Setengah Penganggur



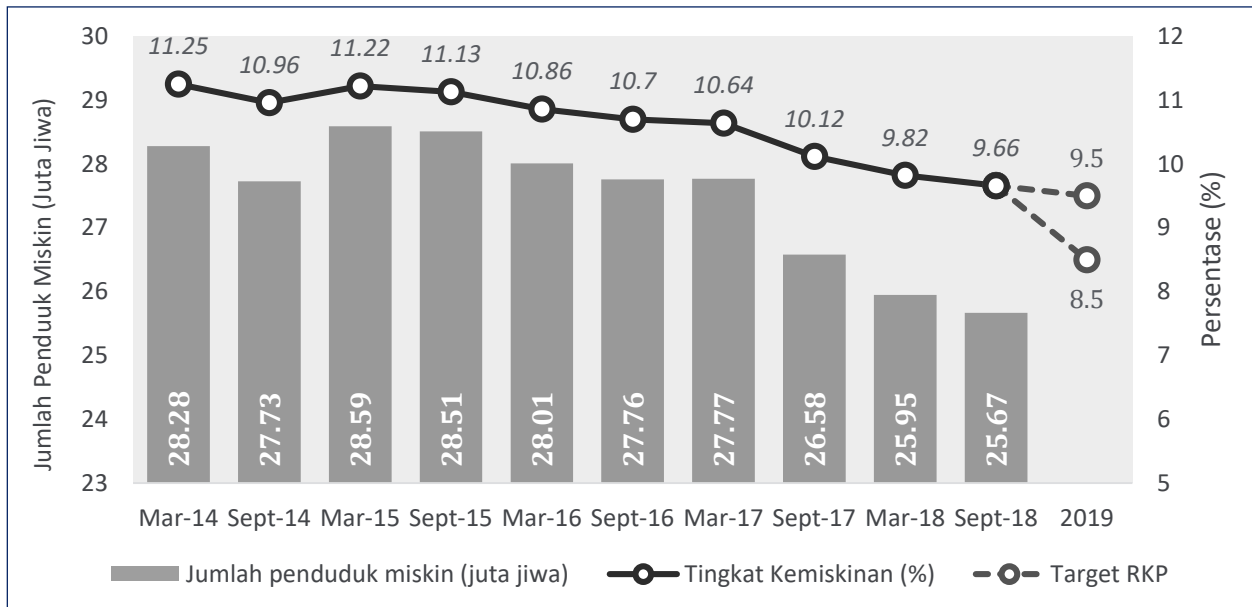
TPT Berdasarkan Pendidikan





Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Terus Menurun

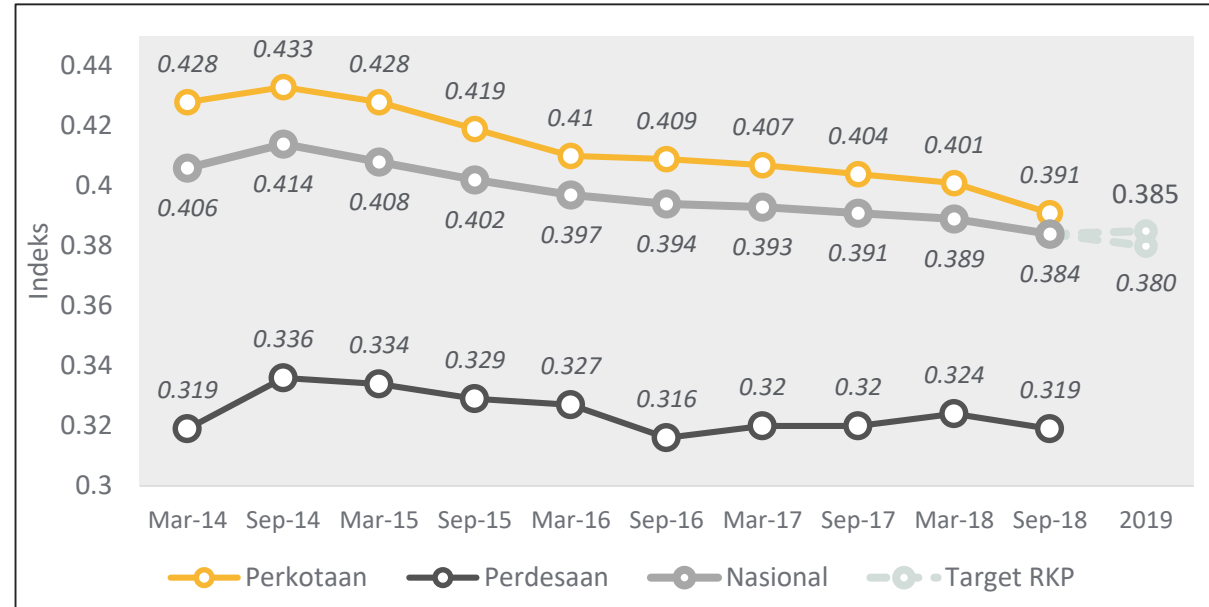
Tingkat Kemiskinan



Sumber: BPS, 2018

- Pada Maret 2018, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan hingga 1 digit (9,82 persen) dan kembali turun menjadi 9,66 persen pada September 2018.
- Tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 8,5-9,5 persen di tahun 2019.
- Jika pertumbuhan ekonomi dapat lebih dinikmati oleh kelompok miskin dan rentan, tingkat kemiskinan akan lebih cepat turun.

Rasio Gini

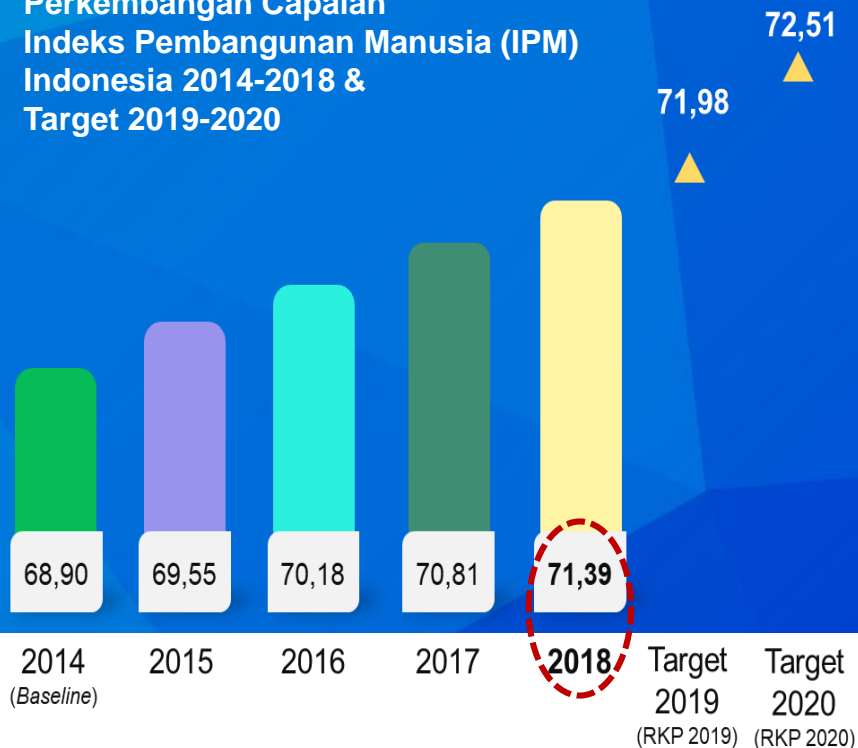


- Rasio Gini menurun bertahap dari 0,414 menjadi 0,384 dalam 4 tahun terakhir.
- Rasio Gini tersebut diperkirakan dapat mencapai target tahun 2019, pada kisaran 0,380-0,385.
- Penurunan Rasio Gini nasional terutama disumbang oleh penurunan Rasio Gini di perkotaan.



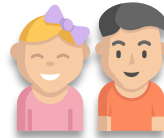
IPM Indonesia terus Meningkat dan Sudah Masuk Kategori Tinggi

Perkembangan Capaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indonesia 2014-2018 &
Target 2019-2020



Sumber: Bappenas dan BPS (perhitungan dengan metode baru)

Capaian Komponen Pembentuk IPM Tahun 2018 & Target 2019-2020



Angka Harapan Hidup Saat Lahir meningkat

71,20 tahun (Capaian 2018) ➔ **71,30 tahun** (Target 2019) ➔ **71,47 tahun** (Target 2020)



Rata-rata Lama Sekolah penduduk 25+ tahun meningkat

8,17 tahun (Capaian 2018) ➔ **8,30 tahun** (Target 2019) ➔ **8,39 tahun** (Target 2020)

Harapan Lama Sekolah penduduk 7 tahun meningkat

12,91 tahun (Capaian 2018) ➔ **13,21 tahun** (Target 2019) ➔ **13,41 tahun** (Target 2020)



Pengeluaran per kapita disesuaikan meningkat
(dalam ribu rupiah)

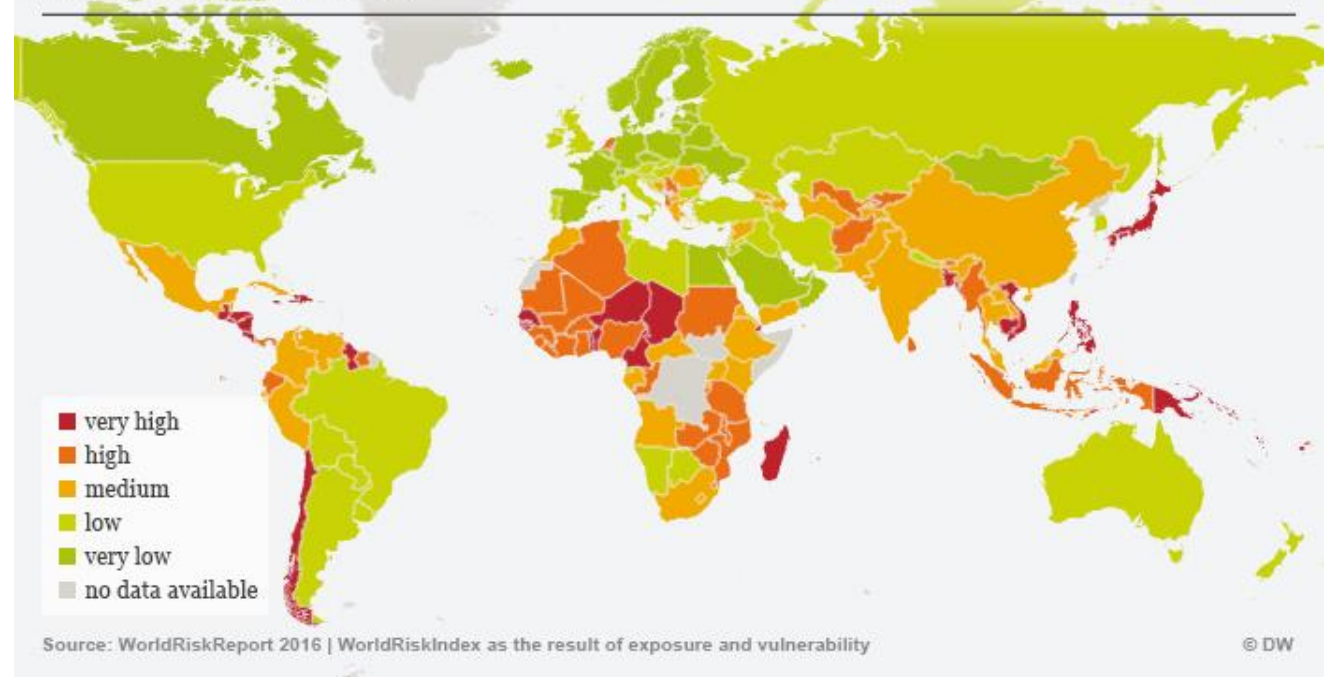
11.059 (Capaian 2018) ➔ **11.131** (Target 2019) ➔ **11.283** (Target 2020)



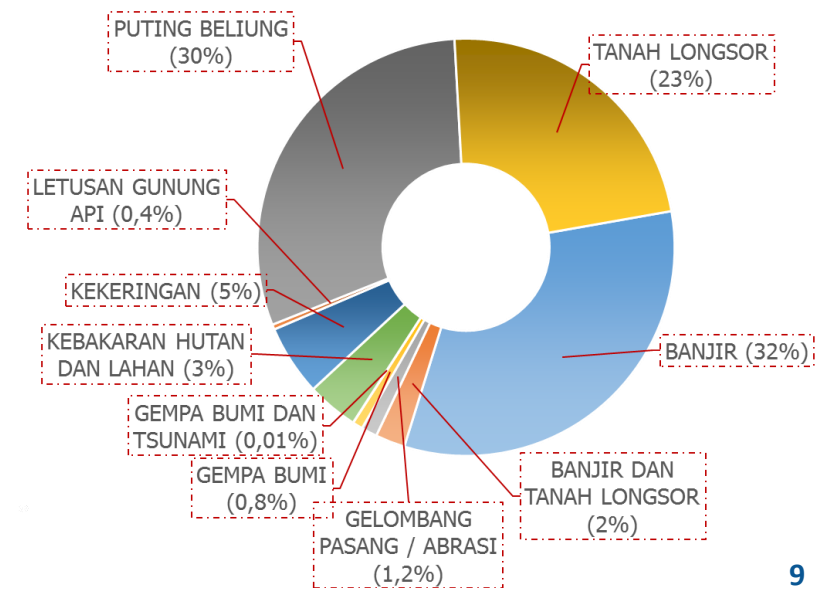
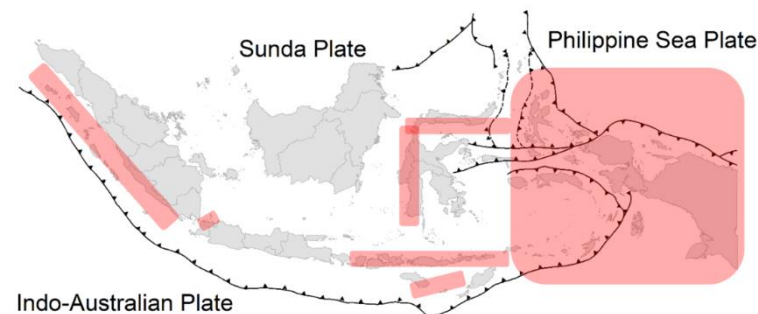
Pertumbuhan Ekonomi Terus Menguat dengan Penguatan Mitigasi

- Dalam World Risk Report (2016), Indonesia termasuk negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi.
- Penyebabnya adalah tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana.
- Kejadian bencana 5 tahun terakhir didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung.
- Dalam perencanaan, pemerintah daerah harus memastikan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

WorldRiskIndex 2016



Kawasan timur menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sekaligus kerentanan bencana





Sasaran Ekonomi Makro dan Target Pembangunan 2020





Arah Kebijakan Makro 2020

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN POTENSIAL INDONESIA

Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan



Revitalisasi Industri Pengolahan



Modernisasi Pertanian



Hilirisasi Pertambangan



Transformasi Sektor Jasa

Penguatan Permintaan Domestik dan Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional



Mendorong investasi sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi



Diversifikasi Ekspor demi Penguatan Stabilitas Eksternal



Menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian

Peningkatan SDM, Pembangunan Infrastruktur,
Perbaikan Regulasi Dan Institusi, Pendalaman Pasar Keuangan

MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI



Menjaga stabilitas Harga, Eksternal, dan Sektor Keuangan

MEMASTIKAN INKLUSIVITAS DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN EKONOMI



Mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan



Mendorong penurunan tingkat kemiskinan



Memperluas akses dan kesempatan

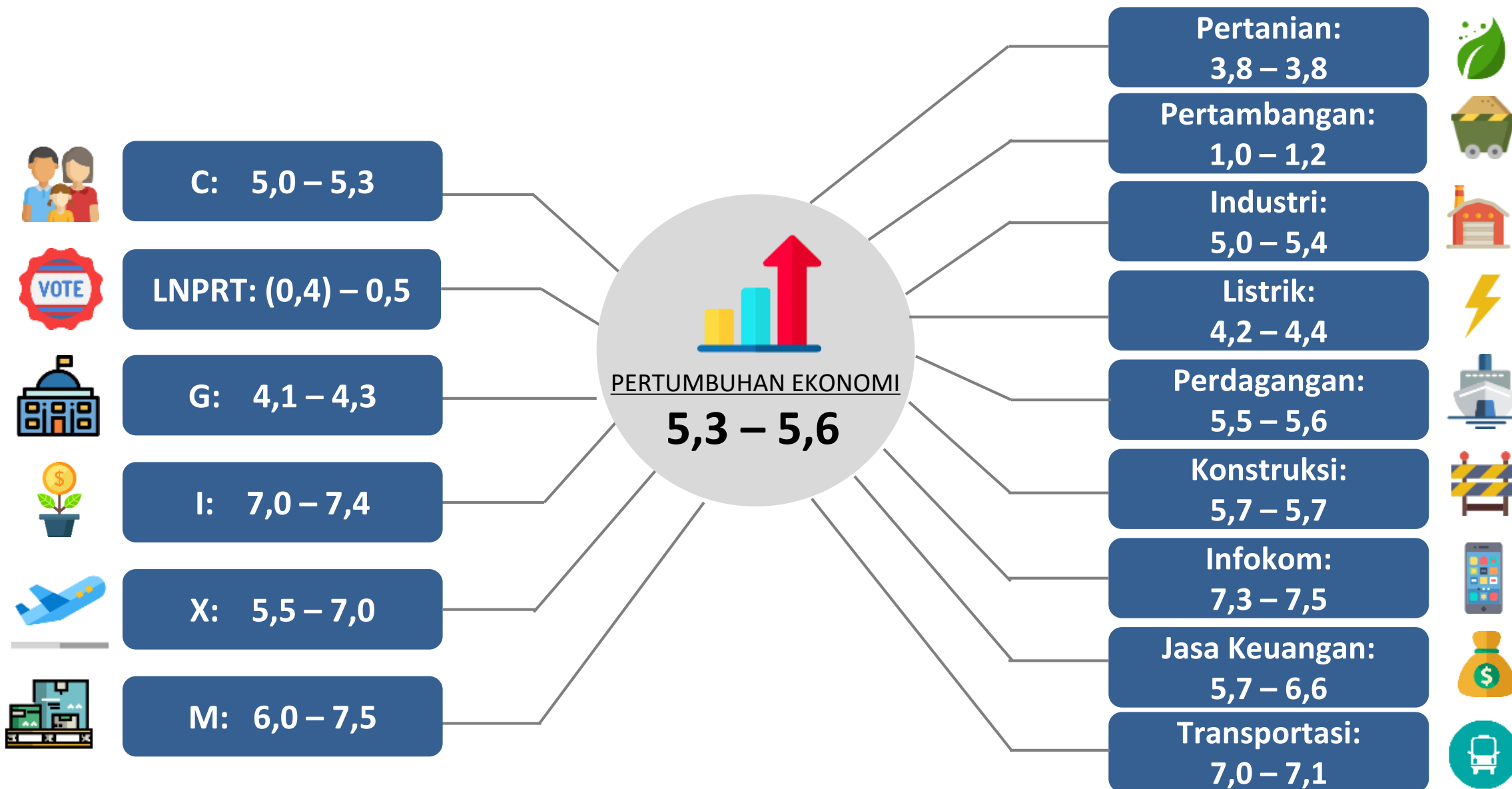


Mempertahankan keseimbangan lingkungan

**Pembangunan
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan**



Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2020

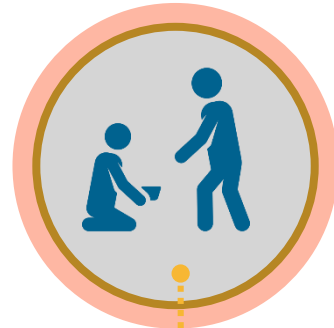
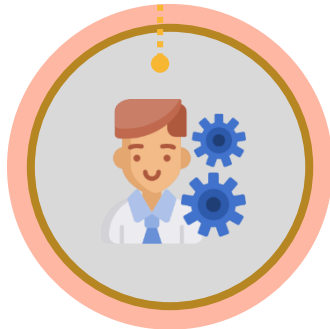




Target Pembangunan Tahun 2020

Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
(nilai)

72,5



Tingkat Kemiskinan
(persen)

8,5 – 9,0

Pertumbuhan Ekonomi
(persen)

5,3 – 5,6



Gini Rasio
(indeks)

0,375 – 0,380

Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
(persen)

4,8-5,1





Arah Pembangunan Wilayah





Pertumbuhan Ekonomi tidak Terpusat di Jawa dan Sumatra

Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera

1. Penguatan **ketahanan bencana** pantai barat Sumatera.
2. Pengembangan **industri** pengolahan (hilirisasi) **komoditas unggulan** (agroindustri).
3. Pengembangan **SDM terampil** untuk mendukung kawasan industri.

Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan

1. Penguatan **konektivitas** wilayah.
2. Pengembangan **industri** pengolahan sumber daya **alam** (hilirisasi) **perkebunan** dan hasil **tambang**.
3. Percepatan pembangunan kawasan **perdesaan, tertinggal dan perbatasan**.

Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi

1. Penguatan **ketahanan bencana** alam dan pemulihan pascabencana Sulawesi Tengah.
2. Pengembangan **industri** pengolahan (hilirisasi) hasil **perikanan, pertanian dan logam dasar**.
3. Pengembangan kawasan **pariwisata**.

Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku

1. Pengembangan kawasan perikanan terpadu dan **industri** pengolahan hasil **perikanan**.
2. Penguatan **konektivitas** antarpulau untuk mendukung industri perikanan dan **pariwisata**.
3. Percepatan pembangunan kawasan **perdesaan, tertinggal dan perbatasan**.

Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

1. Penguatan **ketahanan bencana** di pantai selatan dan pantai barat Jawa.
2. Pembangunan sarana **transportasi massal metropolitan**.
3. Pengembangan **Bali bagian utara**.

Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

1. Pengembangan kawasan **pariwisata terpadu Mandalika, Labuan Bajo, dan Tambora**.
2. Peningkatan **pendidikan vokasi** pariwisata, perikanan, dan peternakan.
3. Penguatan **konektivitas antarpulau** untuk mendukung industri perikanan, peternakan, dan pariwisata, serta mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan perdesaan.

Prioritas Pembangunan Wilayah Papua

1. Pengembangan **tol udara** untuk memperkuat **konektivitas** wilayah.
2. Peningkatan **kualitas SDM** khususnya **pendidikan vokasi** pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pemerataan layanan kesehatan.
3. Optimalisasi **pelaksanaan otonomi khusus**: pemberdayaan masyarakat adat; percepatan pembangunan kawasan kampung; penguatan peran Distrik atau Kecamatan; penguatan kerjasama antarKabupaten; dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu.



Pokok-Pokok RKP 2020





Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

TEMA:
“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”





Kebijakan dan Program Prioritas PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan:

1. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
3. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
4. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
5. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.





Kebijakan dan Program Prioritas PN 2: Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Kebijakan:

1. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
2. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
3. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
4. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
5. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
6. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

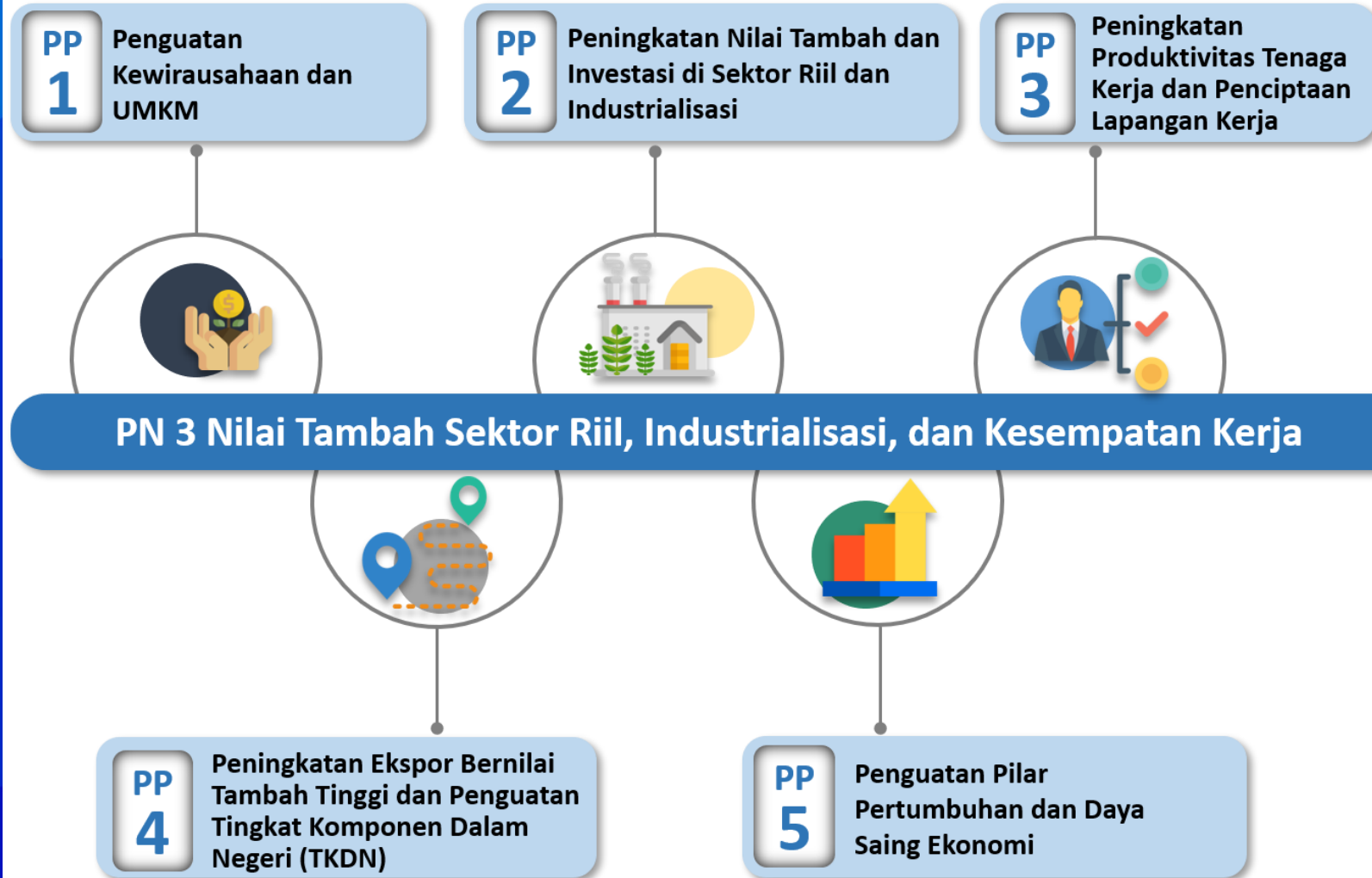




Kebijakan dan Program Prioritas PN 3: Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja

Kebijakan:

1. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
2. Mempercepat transformasi struktural.
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
4. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
5. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

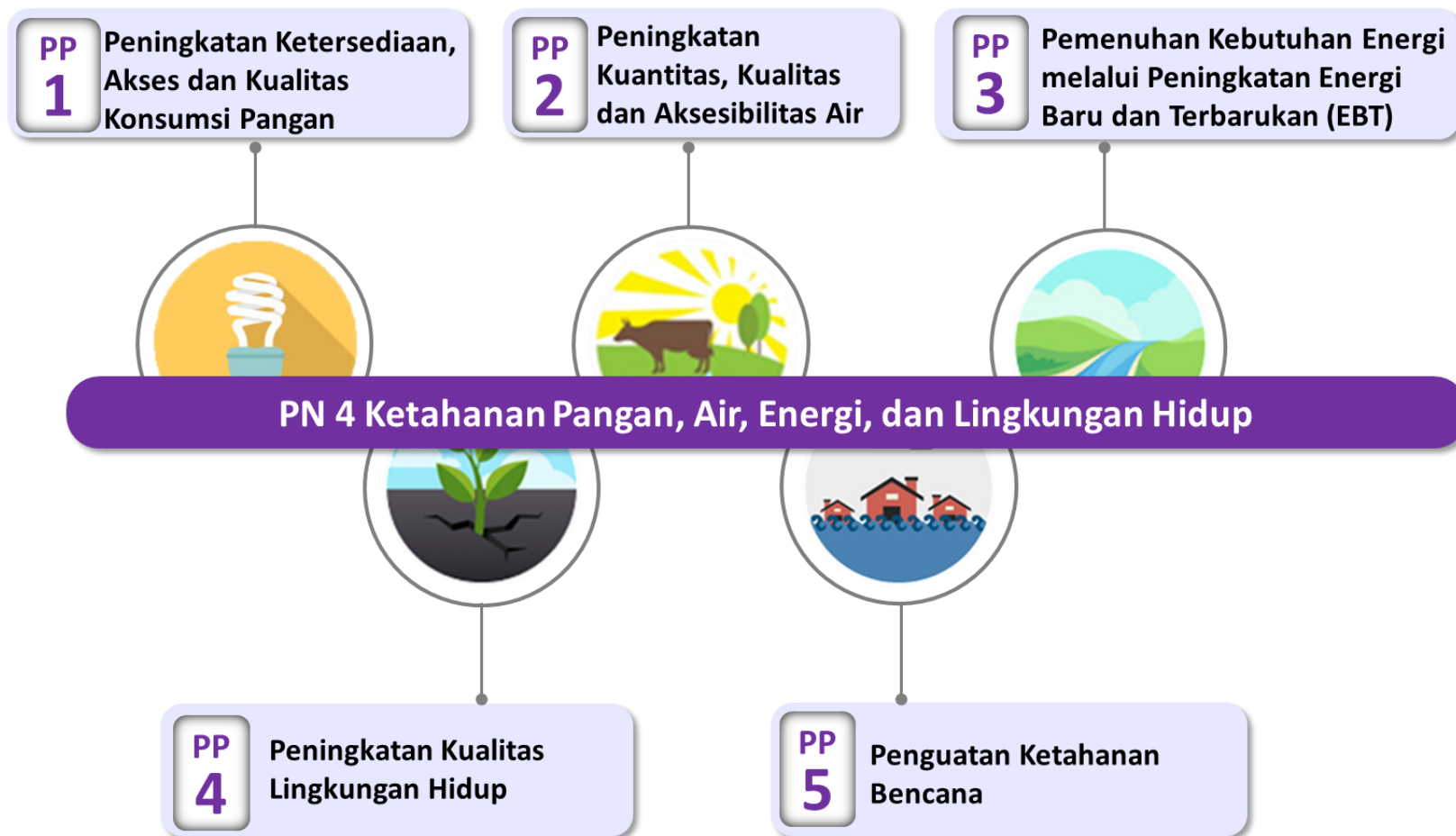




Kebijakan dan Program Prioritas PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan

Kebijakan:

1. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
2. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
3. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
4. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
5. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.





Kebijakan dan Program Prioritas PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Kebijakan:

1. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
2. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional.
3. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
4. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
5. Meningkatkan keamanan siber.





Kerangka Pendanaan





Kerangka Pendanaan

RKP 2020 merupakan RKP transisi menuju RPJMN 2020 – 2024, untuk itu dilakukan :

- Reviu efektivitas dan efisiensi program
- Reviu/Identifikasi kontribusi Masyarakat-Dunia Usaha-BUMN-Pemerintah dalam pendanaan program

Pemangku
Kepentingan

MASYARAKAT

Melalui CSR,
filantropis, waqaf, ZIS

Mendukung prioritas
pembangunan.

Mekanisme

DUNIA USAHA

Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha
(KPBU) dan
Pembiayaan Investasi
Non Anggaran
Pemerintah (PINA)

Infrastruktur ekonomi dan
sosial yang memiliki
kelayakan ekonomi.

BUMN

Penugasan
kepada BUMN

- Mendorong pertumbuhan ekonomi
- Meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

PEMERINTAH

APBN : Memperkuat pengendalian
melalui penyiapan Proyek Prioritas
("satuan 3")

APBD : Mengembangkan *output based transfer* melalui DAK Penugasan dan Hibah Daerah untuk mengamankan prioritas pembangunan di daerah

Diraruhkan utamanya pada:

- Fungsi absolut pemerintah (antara lain politik, hankam).
- Pelayanan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan) dengan Standar Pelayanan Minimal.

Keterangan



Alokasi Pada Prioritas

Prioritas Nasional RKP dirinci dan dikendalikan sampai proyek prioritas di K/L (“Satuan 3”)

Prioritas Nasional	Jumlah Proyek K/L	Rp. Triliun
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.025	148,8
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	574	73,5
Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	701	15,2
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	834	42,5
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	295	45,1
TOTAL	3.429	325,1

BELANJA KL (Rp. 854,0 T)

- Operasional Rp. 299,1 T
- Non Operasional Rp. 554,9 T
 - Alokasi Pada Prioritas Rp. 440,9 T
 - Prioritas yang di rinci hingga Proyek Prioritas di K/L* Rp. 325,1 T
 - Non Prioritas Rp. 114,0 T

Keterangan:

- Baru mencakup Belanja KL
- Kegiatan/Proyek Prioritas di K/L akan dipertajam dalam Pertemuan Tiga Pihak dan Musrenbangnas

Pemanfaatan berbagai sumber pendanaan (Pusat-Daerah-BUMN-Masyarakat) untuk prioritas, akan diintegrasikan hingga penetapan Perpres RKP 2020 (Juni/Juli)



TERIMA KASIH

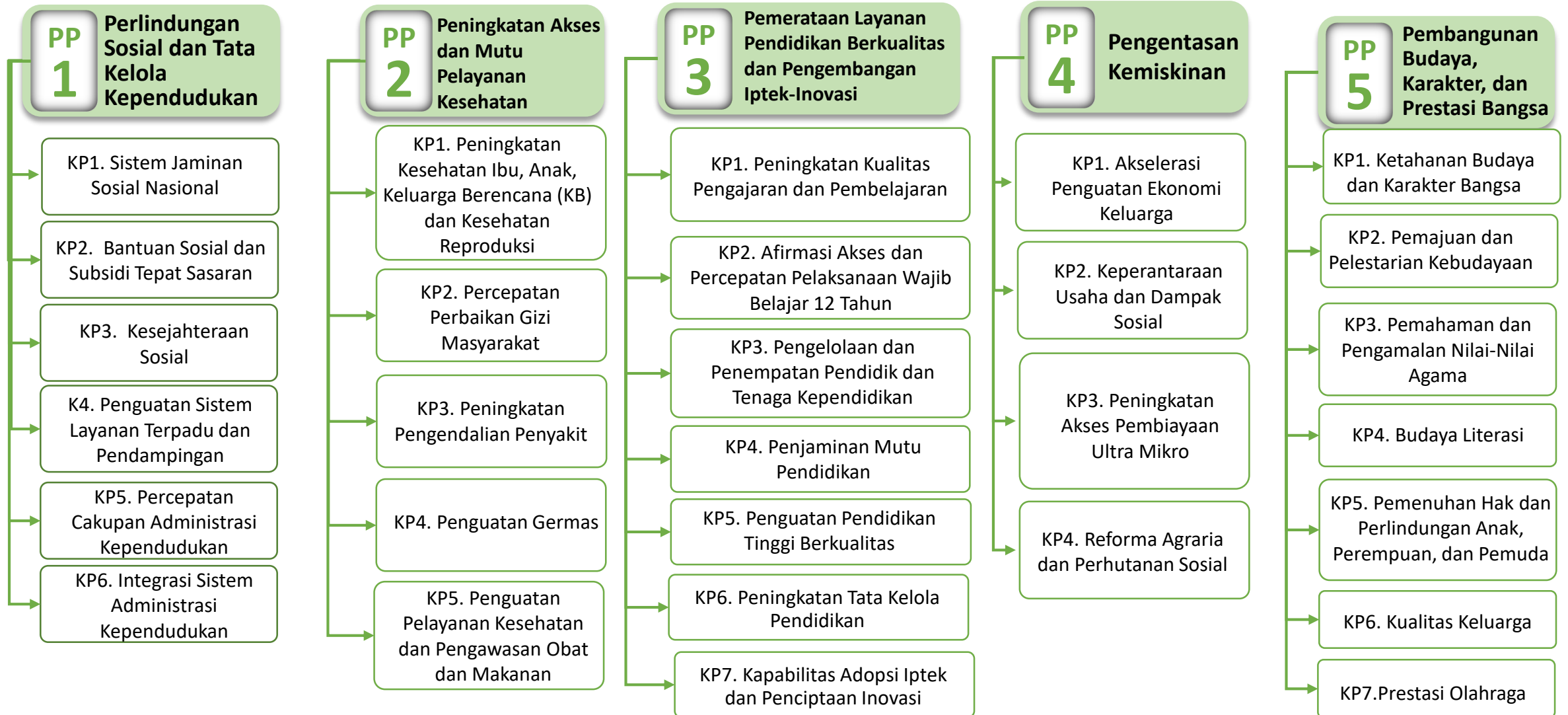


LAMPIRAN



Kegiatan Prioritas PN 1

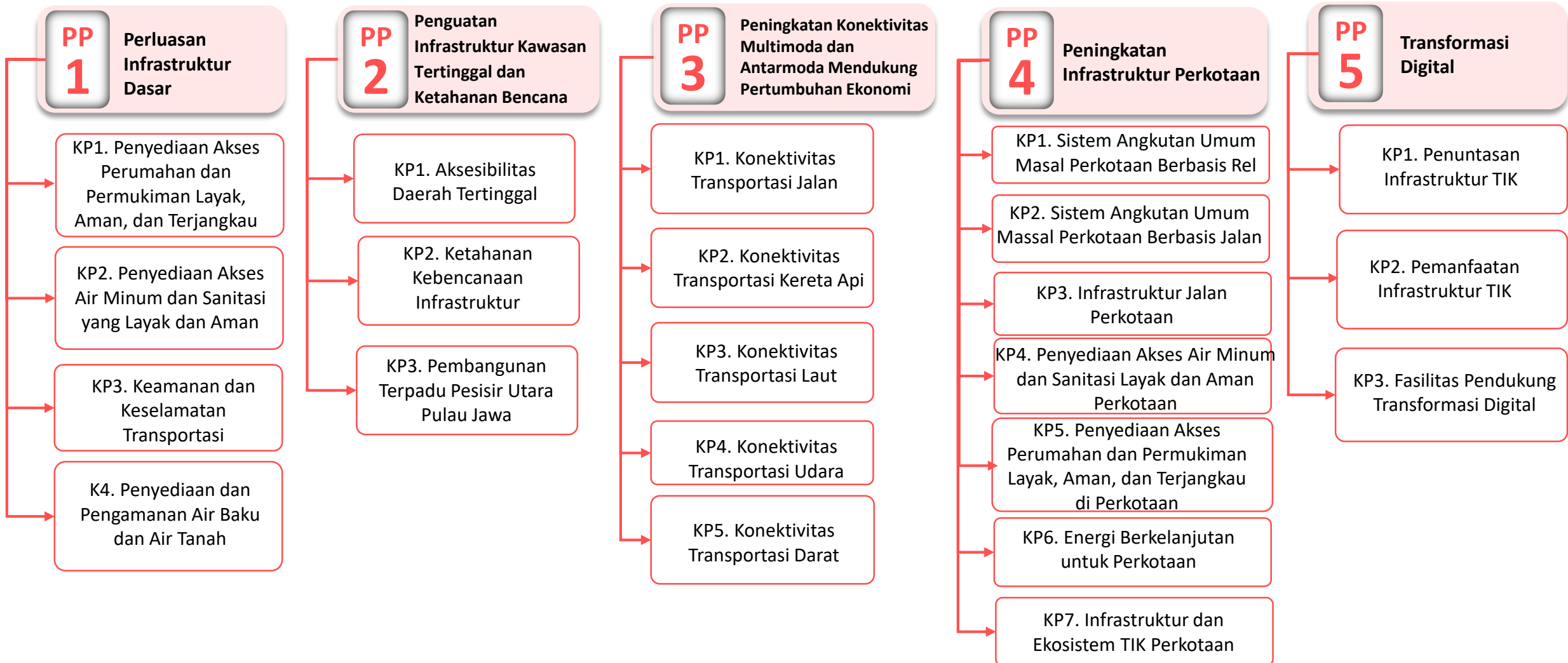
PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan





Kegiatan Prioritas PN 2

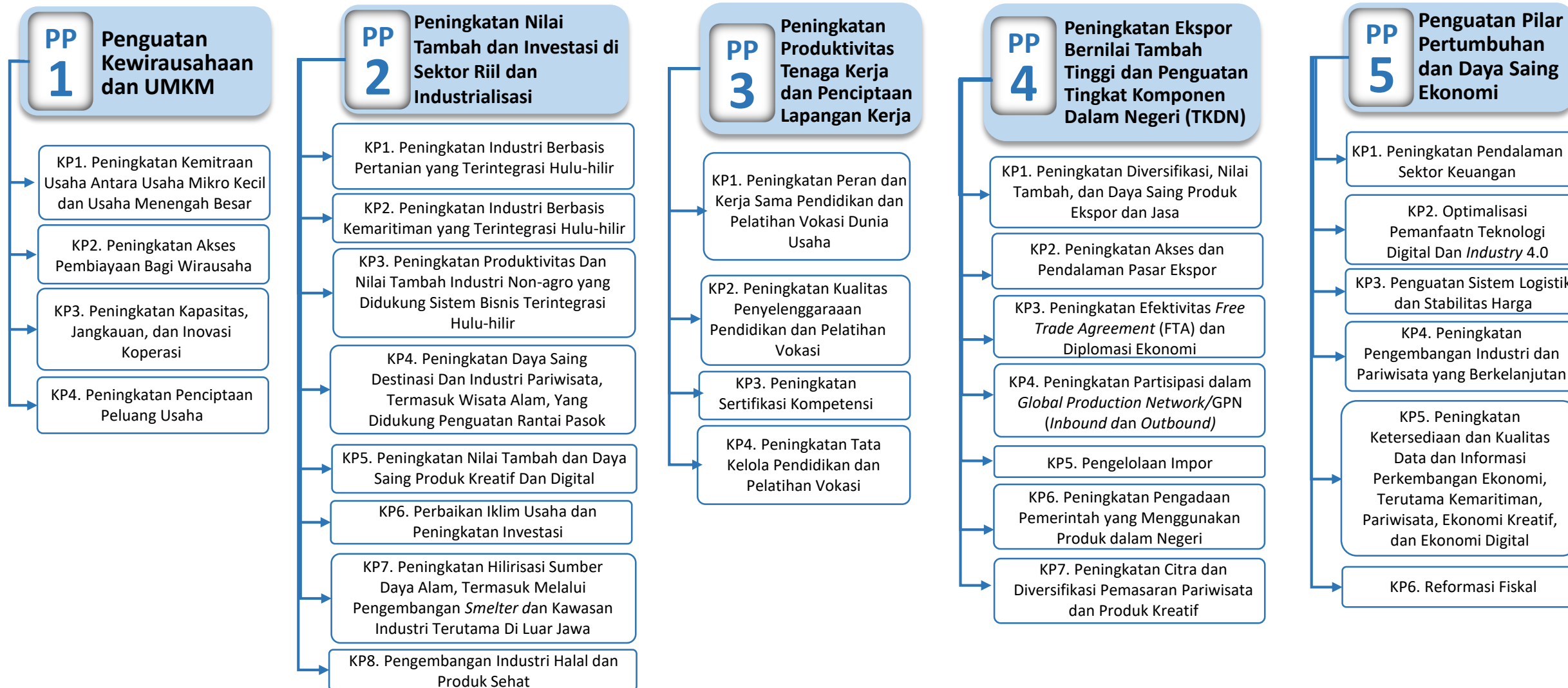
PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah





Kegiatan Prioritas PN 3

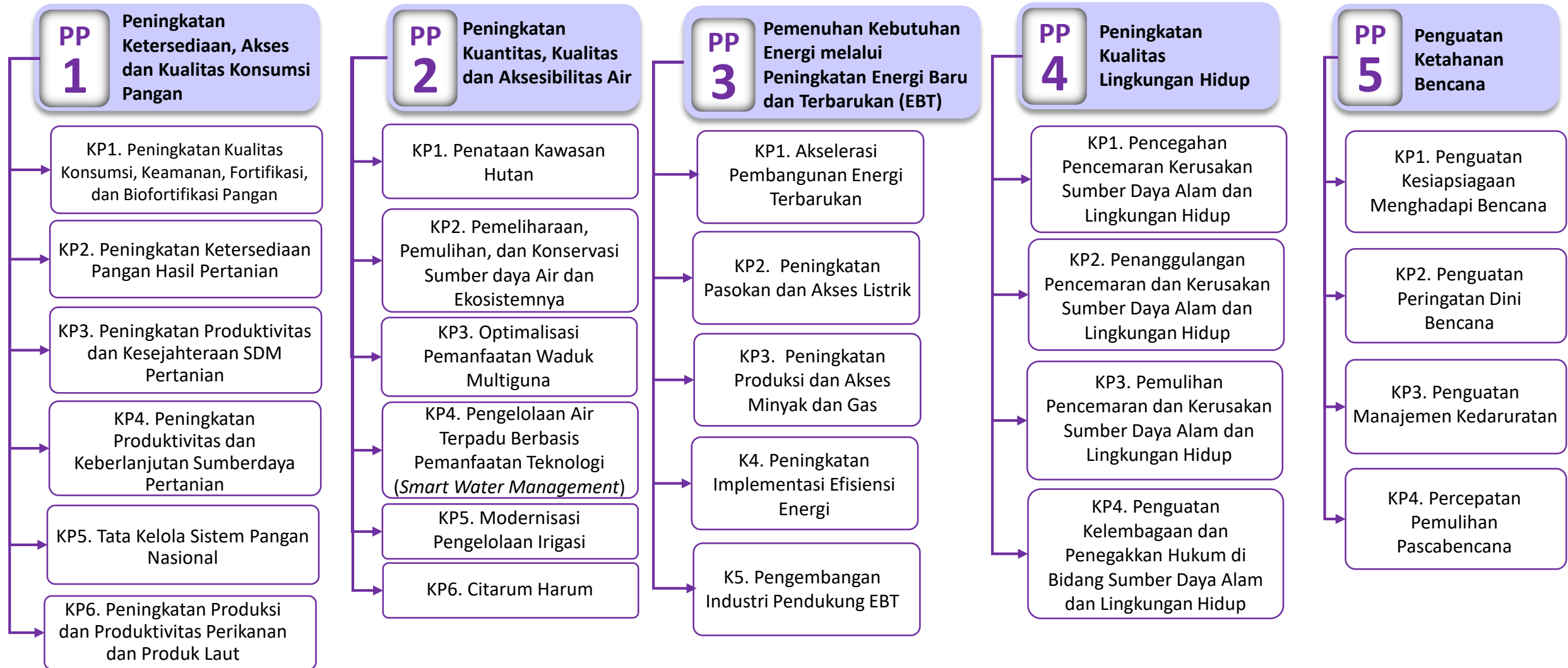
PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja





Kegiatan Prioritas PN 4

PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup





Kegiatan Prioritas PN 5

PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

